

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aprilianda, Nurini, 2022. *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. Universitas Brawijaya Press: Malang.
- Amrullah, Arief, 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Asshidiqqie, Jimly, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Bambang Waluyo, 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Connolly, M. J., Hicks, S. C., Nolan, J. R., Alibrandi, M. N., Nolan-Haley, J. M., Black, H. C., 1990. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. United States: West Publishing Company.
- Direktorat Hukum PPATK, 2021. *kajian hukum permasalahan hukum seputar perampasan aset dalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Fuady, Munir, 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamzah, Andi, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husain, Harun M, 1991. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jahja, H. Juni Sjafrien, 2012. *Melawan money laundering!: mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang*. Jakarta: Visimedia.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Hibnu, 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima.

Sofyan, Andi Muhammad, 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004. *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT. Pustaka Grafiti.

Suranta, Ferrie Aries , 2010. *Peran PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Depok: Gramata Publishing.

Siahaan, Maruarar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sumadi, Ahmad Fadil, 2020. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi : Perkembangan Dalam Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PERS.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Yurizal, 2021, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia: Money Laundering*, Media Nusa Creative Publishing (MNC Publishing), Malang.

Yunus, Husein, dan Roberts, K., 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal**

Barama, Michael, 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3, Nomor 8.

Octaviani, Beutari, 2015. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Indonesia*. *Journal of International Relations*. Volume 1. Nomor 3.

Farrugia, Ursulla M, 2013. *Financial parallel investigations and the confiscation of proceeds from serious crimes*. Master's Thesis University of Malta

Ferwerda, J. (n.d.), 2013. *The effects of money laundering*. Research Handbook on Money Laundering.

- Firdaus, Annas, dan Arifin, R., 2021. *The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act*. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), Volume 6, Nomor 1.
- Lasmadi, Sahuri, 2010, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3.
- Otusanya, Julius Olantude, 2012, *Corruption as an obstacle to development in developin countries: a review of literarure*. Journal of Money Laundering Control 2011, Westlaw J.M.L.C, Volume 14, Nomor 4.
- Putra, Anggara Dwi, Hasan Habib Sutikno, dan Wahono Widodo, 2021. *Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)*. Jurnal IKAMAKUM, Volume 1, Nomor 2.
- Tumiwa, Adrian Formen ,2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 2.
- Simser, 2013, "*Money laundering: emerging threats and trends*". Journal of Money Laundering Control, Volume 16, Nomor 1.
- Suryani, Dewi Ervina, 2020, *Penerapan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Volume 19, Nomor 3.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 711).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719).

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Dan



Perkebunan Nomor 422/KPTS-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil Nomor 6 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118)

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 3 Nomor 2020)

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 339).

The Financial Action Task Force Recommendation 2023

*The United Nation Convention Against Illicit Trafficing Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*

*United Nation Against Transnational Organized Crime (UNTOC) of 2000*

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021

